

Ganasnya Bahasa, Ganasnya Kekuasaan

Oleh Ariel Heryanto

MENGENAI "bahasa Indonesia yang baik dan benar", orang lebih cenderung berpikir macam apa bahasa yang baik dan benar itu, atau bagaimana mewujudkan cita-cita yang dianggap mulia itu. Orang bukan benar-tidaknya anggapan yang mendasari semuanya itu. Tidak ada lagi pertanyaan semacam "baik" buat siapa, atau "benar" menurut siapa?

Di luar tanah air, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu pernah dipersoalkan Alton L. Becker, profesor bahasa dan Asia Tenggara dari AS. Mungkin ada gunanya soal itu dibongkar lebih jauh di Indonesia sendiri. Selagi slogan "bahasa yang baik dan benar" menjadi demam.

Tapi sebelumnya, kita perlu bergulat dulu dengan dua pemikiran tentang "bahasa" yang mapan di kalangan kaum tersekolah (mohon dibedakan dari terdidik) kita. Keduanya pemikiran yang mendasar. Keduanya sangat bisa dan bahkan telah menyesatkan banyak korban. Yang pertama, bahasa dipandang terutama sebagai alat komunikasi. Yang kedua, terbentuknya bahasa dianggap sebagai hasil konvensi atau perjanjian anggota masyarakat sebahasa.

Bukan alat belaka

Dalam suatu ceramah di Salafita untuk sepuluh tahun lalu, Romo Dick Hartoko menyebut ilustrasi menarik. Ia menunjukkan beda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam menyatakan keragaman saudara kandung. Bahasa Inggris membedakan berdasarkan jenis kelamin (*brother* atau *sister*). Bahasa Indonesia membedakan berdasarkan usia (*kakak* atau *adik*).

Dari ilustrasi ini bisa ditarik bermacam-macam tafsiran. Romo Dick sendiri mengajukan ilustrasi itu untuk menyatakan gagasan bahwa pemilik bahasa yang satu mengutamakan jenis kelamin seseorang dalam tata hidup sosialnya. Pemilik bahasa yang lain menganggap usia lebih penting.

Di sini, ilustrasi Romo Dick saya pinjam untuk menunjukkan bahwa kedua bahasa itu, seperti bahasa apa pun, bukan sekadar alat untuk menyatakan atau menjelaskan "kenyataan". Bahasa hanya mampu menyatakan sebagian (mungkin kecil) dari apa yang dapat kita bayangkan sebagai "kenyataan". Tapi pada saat yang sama, bahasa tak cuma menjadi alat yang menyatakan sebagian dari "kenyataan" itu.

Bahasa tak bisa tidak memberikan bumbu-bumbu tambahan untuk (sebagian dari) "kenyataan" yang hendak dijelaskan. Alhasil, apa yang dinyatakan bahasa merupakan kenyataan baru atau lain dari apa yang mau dinyatakan pemakainya. Unsur "fiksi" dan faktual" rukun sehidup-semati dalam setiap bahasa.

Biar pun kata "kakak" atau "adik" kita beri embel-embel "perempuan" atau "laki-laki", kata-kata itu belum menyatakan sepenuhnya "kenyataan" yang ada. Setiap kata, embel-embel atau bukan, selalu berbumbu penonjolan "fiksi" atau "faktual" tertentu dari "kenyataan". Bahasa tak pernah netral.

Pikiran bahwa bahasa merupakan alat komunikasi belaka jadi nyata semacam ketahyulan. Ketahyulan ini penting sekali buat para pemilik kekuasaan sosial. Ketahyulan itu menjadi kedok dan sekaligus senjata ampuh untuk melancarkan kekuasaannya secara terhormat dan terselubung. Maka hamburan bahasa dalam sidang pengadilan, dalam kelas sekolah/kuliah, dalam berita media massa akan nampak akan-akan merupakan sajian rekaman "kenyataan" yang benar apa adanya.

Kecenderungan mengerdilkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi belaka mendorong subur nya usaha memahami "bahasa" tanpa melihat kaitan yang tak terpisahkan dengan "kenyataan" itu sendiri. Yang dianggap terpenting ialah "kenyataan". Sedang baik-buruknya sang alat penjelas yang dinamakan "bahasa" dianggap jadi persoalan tersendiri. Itu sebabnya sebagian besar studi bahasa di sekolah-sekolah kita merupakan kesibukan bongkar-pasang onderdil mesin bahasa. Hal-hal lain dianggap berada di luar masalah "kebahasaan". Studi bahasa jadi sibuk dengan soal-soal ejaan, tata bahasa, atau makna kata ala kamus. Semuanya merupakan upaya menciptakan alat (mesin) komunikasi yang baik dan benar, sekaligus membasmikan yang dianggap tidak baik dan tidak benar.

Kalau bahasa dianggap alat komunikasi belaka, sebuah perumpamaan bisa diajukan. Sebagai alat pengantar pesan atau gagasan, bahasa ibarat mobil pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Perumpamaan ini kurang tepat. Tapi kalau dipakai, maka ada banyak hal perlu diingat. Apa yang terjadi ketika barang angkutan itu dimasukkan ke mobil? Apa yang terjadi selama perjalanan? Barang angkutan itu kena angin, kena debu, kena panas dan hujan, kena guncangan-guncangan. Di terminal-terminal tertentu kena pungli!

Risiko kerusakan barang selama perjalanan bisa-bisa saja, dikesikan dengan usaha menciptakan mobil sebaik mungkin. Tapi usaha itu mubazir jika mengabaikan faktor-faktor konteks sosial dan alam di luar mobil itu sendiri. Bandingkan dengan usaha memproduksi bahasa sebaik dan sebenar mungkin dengan bersibuk mengotak-atik ejaan, tata bahasa, atau arti kata ala kamus.

Seperti disebut di atas, perumpamaan itu sendiri kurang tepat, belum cukup menjelaskan sumber kesesatan pemikiran bahasa sebagai alat belaka. Hubungan antara bahasa dan gagasan tidak serenggang antara mobil dan barang angkutan. Bahasa bukan sekadar alat pengantar gagasan yang bisa mondar-mandir atau parkir tanpa ditumpangi gagasan atau (gagasan tentang) "kenyataan". Bahasa itu sendiri suatu kenyataan. Bahasa itu sendiri terbentuk oleh pikiran dan perasaan.

Tapi bahasa juga pembentuk pikiran dan perasaan orang (kecuali bayi, bukan sekadar alat berpikir atau merasa. Bahasa juga pembentuk "kenyataan", karena apa yang disebut "kenyataan" tak lain dari hasil serap indra dan daya olah benak kita. Daya serap dan daya olah benak kita sangat (tak usah dibilang hanya) ditentukan oleh bahasa yang pernah kita gauli.

Pikiran dan perasaan bukan sekadar tamu atau penumpang yang onggang-onggang sendirian di luar bahasa, dan cuma sewaktu-waktu dijemput bahasa untuk diajak berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain.

Mereka yang hanyut dalam pemikiran bahasa terutama sebagai alat komunikasi belaka dengan gampang akan percaya pada pepatah "apalah artinya sebuah nama?" Anggapan dasarnya: kenyataan adalah kenyataan, tak perduli apa tingkah bahasa untuk mempersoalkan kenyataan itu.

Pada lapisan permukaan, pandangan itu tampak bertolak belakang dengan mereka yang yakin akan perlunya pembakuan bahasa yang baik dan benar.

Keyakinan yang telah menggerogoti banyak anggaran dan hati rakyat itu justru menekankan pentingnya "nama" yang baku untuk menyatakan sesuatu secara baik dan benar.

Pada lapisan lebih dalam, kedua pandangan itu seragam. Keduanya mengabaikan kaitan tak terpisahkan di antara bahasa dan kenyataan sosial historis yang menjadi konteksnya. Yang satu mengutamakan "kenyataan", yang baik dan benar, dan menomorduakan "bahasa". Yang lain mengutamakan "bahasa" baku yang baik dan benar, tanpa mempertanyakan secara serius: baik untuk siapa, benar menurut siapa?

Pemaksaan bukan perjanjian

Pemikiran bahwa bahasa terbentuk sebagai hasil konvensi atau perjanjian sama parah-sesatnya dengan pemikiran bahwa bahasa adalah alat komunikasi belaka. Hubungan makna dan kata memang arbitrer, tapi tidak acak, kata R. Williams.

Terbentuknya bahasa merupakan hasil persengkongkolan dan pertarungan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup dalam masyarakat bersangkutan, bersambungan dari masa ke masa, bukan hasil musyawarah damai sebagian besar warga sebahasa tanpa ancaman dan paksaan. Wajah, watak dan tingkah bahasa yang terbentuk lebih banyak ditentukan yang lebih berkuasa, dan lebih menguntungkan yang berkuasa pula.

Tapi tak usah keburu tanya: benarkah "langit" disebut "langit" karena menguntungkan penguasa? Tak mudah menjelaskan posisi dan peran sosial-politik setiap kata dalam zamannya. Seperti tak mudah (kalau bukan mustahil) menjelaskan kepada pihak mana setiap warga masyarakat berpihak. Lebih mungkin mengira-ngira mengapa ada bahasa dibuat bertingkat-tingkat di suatu masa, di suatu masyarakat. Atau mengapa ada masa dalam sejarah kita istilah "Cina" didesakkan untuk menggeser istilah "Tionghoa". Dua soal itu pernah dipersoalkan dengan bagus oleh Benedict Anderson, profesor yang serba ahli itu.

Setiap kata punya riwayat seruit mahkluk penciptanya. Ada yang lebih berperan daripada yang lain dalam sejarah kita. Serasa mustahil melacak silsilah dan riwayat sebagian besar kata-kata dalam bahasa kita. Usia mereka jauh melampaui usia dan daya jangkau teknologi kita. Tapi kata-kata baru dilahirkan untuk kepentingan baru yang punya kuasa. Kata-kata dari generasi terbaru lebih bisa menjelaskan pokok pikiran yang ingin dikemukakan di sini.

Istilah kumpul kebo, tari kejang, canggih atau rekayasa merupakan beberapa contoh mutakhir. Kita sempat jadi saksi hidup kelahiran (baru) mereka. Kata-kata itu mungkin ada yang berusia tua. Tapi baru belakangan ini dijelmakan lagi dengan pengertian baru. Terbentuknya istilah-istilah dengan sosok dan makna baru ini sama sekali tak melalui sidang konvensi atau perjanjian bersama warga bangsa Indonesia. Tak ada kesempatan dan hak yang adil serta merata untuk tawar-menawar soal ini dengan segenap warga sebahasa.

Pembentukan kata dan makna baru terutama (bukan hanya) digenot dari yang berkuasa dilapisan atas masyarakat ke segenap lapisan yang lain. Istilah seperti kumpul kebo atau tari kejang bukan sekadar alat (netral) untuk menjelaskan suatu kenyataan. Keduanya jelas-jelas dibentuk untuk mencoreng-moreng apa yang hendak dinyatakannya. Keduanya merupakan serangan dan penghinaan terhadap sekelompok warga masyarakat.

Istilah seperti canggih atau rekayasa juga bukan sekadar alat (netral) untuk menjelaskan kenyataan. Istilah-istilah itu diberi banyak gincu, disemprot parfum nilai sosial. Diproduksi di satu pojok lapisan atas masyarakat untuk memuliakan kelompok di lapisan itu.

Kita boleh mendukung atau menolak penghinaan dan pemuliaan itu. Tapi yang jelas dengan berbahasa kita tak pernah mungkin netral. Tanpa berbahasa kita tak mungkin bermasyarakat. Dalam bermasyarakat kita tak mungkin netral.

Besar-kecilnya dukungan atau perlawanan kita pada salah satu atau beberapa tingkah politik berbahasa itu tergantung dari besar-kecilnya kekuatan sosial kita juga. Sebuah penerbitan media massa yang besar, misalnya, dapat berbuat banyak dalam hal ini. Ia bisa memilih bahasa macam apa yang disebarkannya. Untuk melawan pengertian menghina dari istilah-istilah urakan dan kampung, dibutuhkan seorang Rendra di tahun-tahun 1970-an.

(Bersambung ke hal V kol. 6-7)

Ganasnya — —

Pemilik kekuatan sosial di lapisan atas masyarakat memang tak terhimpun dalam satu pusat kubu. Bukan tak ada ketegangan di antara mereka sendiri. Ketegangan antara kaum tersekolah dan beberapa pejabat pemerintahan muncul, misalnya, dalam soal lalaf semangkin. Penyerangan lewat istilah kumpul kebo atau tari kejang bukan dibidikkan terutama pada warga kelas bawah. Berbeda dari istilah seperti urakan, kampung, atau tak terdidik. Bahasa mbeling para remaja di majalah pop dan siaran radio swasta yang membangkang bahasa baku "baik dan benar" juga menghuni wilayah atas dan tengah dalam masyarakat kita.

Kaum tani, nelayan, babu dan jongos, jembel dan gali bisa-bisa saja mencipta istilah-istilah dan sub sistem bahasa tersendiri. Tapi tak bakal ada anggaran, seminar apalagi penerbitan media massa untuk mendukung dan meningkatkan kehormatan mereka ke seluruh warga bangsa. Tak ada corong mikrofon untuk bahasa mereka dalam upacara terhormat.

Untuk siapa, Menurut siapa

Pertarungan bahasa pada hakikatnya merupakan pertarungan kekuatan sosial. Pemasyarakatan bahasa baku yang "baik dan benar" merupakan salah satu upaya melebarkan sayap kekuasaan serumpun pemilik kuasa dalam masyarakat ini untuk membaikkan kedudukan mereka, untuk membenarkan kekuasaan mereka. Sebuah upaya mirip pernah dikerjakan pemerintah penjajah Hindia Belanda dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi kaum tersekolah dan menyerang bahasa Melayu Pasar/Rendah (salah satu sumber awal persatuan bangsa ini) serta kehidupan pemiliknya.

Sebagian besar warga bangsa tercinta ini berpeluang amat kecil untuk meraih bahasa "baik dan benar" ala kaum tersekolah kita.

(Sambungan dari halaman IV)

Untuk memaksa diri belajar berbahasa kaum atas itu, mereka akan butuh uang sekolah, uang pembeli buku, dan pendengar penyiar televisi. Itu pun tak cukup sekali dikerjakan, tak cukup sebulan. Untuk melatih ketrampilan berbahasa itu, mereka juga akan butuh bersepatu dan berdeodoran untuk bergaul dengan kaum tersekolah. Dalam pergaulan seperti itu, mereka mesti tunduk pada aturan pergaulan kaum atas pula.

Tanpa mampu membayar ongkos sebesar itu, mereka tak perlu mimpi berbahasa yang dibilang "baik dan benar" oleh kekuasaan resmi. Padahal kaum tersekolah tak jarang berpendapat bahwa bahasa adalah cermin pikiran dan perasaan orang. Jangan kaget kalau ada pihak tersekolah yang (diam-diam atau bisik-bisik) menilai kaum tak berduit, tak bersepatu, tak berparfum itu tak punya pikiran serta perasaan yang baik dan benar.

Untunglah, kaum di lapisan bawah itu biasanya tak perduli dan tak gampang terkecoh oleh kibulan politik pembakuan bahasa yang "baik dan benar". Justru kaum tersekolah (yang kurang terdidik dan berkuasa) yang paling sering perlu dikasihani. Mereka sering kelabakan dan blingsatan. Mereka terengah-engah belajar ejaan, tatabahasa atau makna kata yang dibakukan sebagai "baik dan benar". Bahasa mereka bukan lagi bahasa segar yang menyatu dengan kehidupan mereka. Tapi bahasa yang lebih dulu diproduksi massal oleh para pemegang pentolan kuasa dalam masyarakat. Biayanya dibayar rakyat banyak, labanya untuk rakyat elite.

Kritik terhadap politik pembakuan bahasa "baik dan benar" ini mungkin tersaji dalam bahasa yang kelewat "baik dan benar". Apa boleh buat. Ini adalah sebuah awal. ***

* Ariel Heryanto, dosen pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.